

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Objektif.....	8
2. Tujuan Subjektif.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Akademis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Rezim Hukum Pemilihan Kepala Daerah	19
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	26
C. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Bahan Penelitian	38
C. Cara Pengumpulan Data	41
D. Analisis Hasil Penelitian	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan dan <i>Ratio Legis</i> yang Mendasari Pengaturan terkait Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	46
1. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	48
2. Pemantau Pemilihan yang Terdaftar dan Terakreditasi	52
3. Ambang Batas Selisih Perolehan Suara	57
B. Dinamika Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang Mengesampingkan Ketentuan Ambang Batas Selisih Perolehan Suara dalam Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	72
1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Mengesampingkan Ketentuan Ambang Batas Selisih Perolehan Suara	73
2. Perkembangan Praktik Pengesampingan Ketentuan Ambang Batas Selisih Perolehan Suara oleh Mahkamah Konstitusi	107
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121